



RLPPD

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2026**



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025**



Dr. DEDY WAHYUDI BZ, S.E., M.M.
WALIKOTA BENGKULU



RONNY PL TOBING, S.H.
WAKIL WALIKOTA BENGKULU



1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Penyajian hasil kinerja makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam evaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan, capaian indikator makro Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro Kota Bengkulu

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Satuan(%)
1	Indeks Pembangunan	83,95	84,59	-
2	Manusia	13,76	11,91	persen
3	Angka Kemiskinan	5,04	5,00	persen
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,39	5,56	persen
5	Pertumbuhan Ekonomi	83.430.000	85.530.000	rupiah
6	Pendapatan Per kapita atas Dasar Harga Berlaku	46.838.550	48.687.600	rupiah
7	Pendapatan Per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	0,440	0,443	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, 2026



Tabel 1.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Persentase pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB; Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil, Nilai Investasi	69,64
		2. Capaian Jaringan Kota Kreatif	15
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,34
3	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5
4	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	79
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Kelancaran Lalulintas	0,37
6	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75,1



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
7	Meningkatnya Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,85
8	Menurunnya risiko bencana	Indeks risiko bencana	141,71
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah	11,93
		2. Harapan Lama Sekolah	16,35
10	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda yang Berprestasi	45
11	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75
12	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,87
		2. Penghargaan Kota Layak Anak	Madya
13	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	1. Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		2. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	90
14	Meningkatnya Harmoni Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Sosial Ekonomi Dan Budaya	80
15	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3,1
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB
		3. Indeks Profesionalitas ASN	62
		4. Indeks Inovasi Daerah	79,1
		5. Opini Laporan Keuangan	WTP
		6. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Control For Prevention (MCP) KPK	77
		7. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

Sumber : Dokumen RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026



2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Tabel 1.3

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	75,07%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,57%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,74%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	73,30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	75,59%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,05%	Dinas Kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	0,6%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	70,41%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	89,18%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	94,17%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	76,73%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	34,67%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	23,1%	Dinas Kesehatan
		Persentase warga	73,7%	Dinas Kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	92,2%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	86,3%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100%	Dinas Kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		(Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar		
3	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam	100%	Dinas Sosial



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Dinas Sosial
4	Ketentraman, Ketertiban Umum	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	66,67%	BPBD
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Satpol PP
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	Satpol PP
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan	1,22%	BPBD



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	54,47%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang tertangani		Permukiman dan Pertanahan
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Pekerjaan Umum	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	57,96%	Dinas PUPR
		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	55,74%	Dinas PUPR
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk	33,17%	Dinas PUPR



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	0,024%	Dinas PUPR
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	0%	Dinas PUPR
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	0%	Dinas PUPR
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kota	0%	Dinas PUPR



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100%	Dinas PUPR
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	Dinas PUPR
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100%	Dinas PUPR

Sumber : SILPPD Kemendagri, 2026 dan olah data Perangkat Daerah 2025

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023. Tentang hasil evaluasi PPD secara nasional berdasarkan LPPD tahun 2022. Kota Bengkulu meraih peringkat 66 dari 93 kota di Indonesia, dengan skor 2,83 (sedang). Untuk hasil evaluasi Tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam usaha meningkatkan Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bengkulu Tahun 2024, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melakukan langkah-langkah yaitu:

- a. Membuat program dan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dengan menunjuk petugas penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari perangkat daerah.
- b. Koordinasi dengan Inspektorat Kota Bengkulu Perihal verifikasi data dari perangkat daerah sebelum disampaikan ke Bagian Pemerintahan untuk diinput dan disusun.

1) Opini Laporan Keuangan

a. Membandingkan Antar Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.
bahwa target Opini Laporan Keuangan telah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu untuk mendapat predikat WTP dan tentunya target tahun 2025 juga WTP dengan Formulasi yakni Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan Daerah. Indikator ini harus mencapai target yaitu WTP sebagaimana untuk tahun 2025 dengan capaian 100 % , (WTP)

- b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun Ini Dengan Tahun Lalu.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2025 yakni targetnya memperoleh predikat WTP Dengan predikat Tahun Lalu yaitu Kota Bengkulu mendapat Predikat hasil Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan Daerah yakni WTP.



- c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Di Dokumen RPD.

Membandingkan Realisasi Kinerja Dalam Target Jangka Menengah Yang Terdapat Di Dokumen RPD mempunyai target tahun 2025 yaitu memperoleh Predikat WTP dengan Formulasi Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan Daerah maka capaian hasil indikator kinerja tahun 2025 atas opini Laporan Keuangan Daerah mendapat predikat WTP.

- d. Membandingkan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional.

Tidak Ada Standar Nasional

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Pada Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah agar Pemerintah Daerah berhasil mencapai target Opini WTP maka ada beberapa hal yang perlu dicermati dengan benar dalam pelaksanaannya berdasarkan Opini Laporan Keuangan analisis atas Opini Laporan Keuangan adalah Neraca Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan keuangan daerah.

Keuangan untuk tahun yang berakhir, serta perlu memperhatikan hal seperti kesesuaian laporan keuangan dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan capaian kinerja mencapai 100% (seratus persen) atas pelaksanaan program. Terjadinya efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja indikator sasaran yang sesuai target, dikarenakan sumber daya yang ada berupa anggaran, aset maupun sdm yang tersedia di manfaatkan secara benar dan konsekuen, akan tetapi masih diperlukan perbaikan dibeberapa bidang urusan.

- g. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Analisis Program dan kegiatan yang menunjang kegiatan yakni ada beberapa hal yang dicatat atas hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut; a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, Realisasi Belanja harus Sesuai Ketentuan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat UU, dan menindaklanjuti atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI. selanjutnya bahwa bidang urusan Pembukuan pelaporan keuangan dan bidang Aset pro aktif melakukan pendampingan kepada setiap OPD agar supaya tertib dan selalu mengikuti petunjuk peraturan yang berlaku sebagai wujud kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku, serta berkoordinasi kepada APIP.

rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP dan menyampaikan kepada BPK

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Jumlah anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.341.716.685.516** yang selanjutnya realisasi sebesar **Rp 1.145.104.764.945,72**.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota Bengkulu Tahun 2025 dialokasikan Anggaran Belanja sebesar Rp. **1.403.733.304.344**. Anggaran tersebut didistribusikan ke dalam 119 Program. Dengan realisasi belanja adalah **Rp. 1.111.965.087.234,83** atau sebesar **(79,21%)**. Realisasi anggaran masing-masing sasaran program pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Laporan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.341.716.685.516	1.145.104.764.945,72	-196.611.920.570,28
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	360.972.864.089	296.958.846.881,72	-64.014.017.207,28
3	Belanja Daerah	1.403.733.304.344	1.111.965.087.234,83	-291.768.217.109,17
4	Belanja Operasi	1.231.081.937.443,39	966.807.997.795,04	-264.273.939.648,35
5	Belanja Modal	171.651.366.900,61	145.157.089.439,79	-26.494.277.460,82
6	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	0	1.000.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, 2025



5. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN, DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Tabel 1.5

Realisasi Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PEMBIAYAAN DAERAH	62.016.618.828	68.804.084.687,45	110,94
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.016.618.828	68.804.084.687,45	110,94
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	62.016.618.828	68.804.084.687,45	110,94

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, 2026

6. INOVASI DAERAH

- Membandingkan Antar Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.
Indeks Inovasi Daerah mempunyai target tahun 2025 yaitu 79% dengan realisasi 80% dengan Capaian 101% dengan Formulasi Skor Total Dibagi Skor Total Maksimum Dikali 100% Indikator ini melebihi target.
- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun Ini Dengan Tahun Lalu. Indeks Inovasi Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun Ini Dengan Tahun Lalu, terjadi peningkatan yang signifikan yaitu dari tahun 2024 diangka 76,72 % naik menjadi 80 % di tahun 2025 ini.
- Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Di Dokumen RPD. Indeks Inovasi Daerah pada Target Jangka Menengah Yang Terdapat Di Dokumen RPD mempunyai target tahun 2025 yaitu 79 dengan Formulasi Skor Total Dibagi Skor Total Maksimum Dikali 100%
- Membandingkan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional.
Tidak ada standar nasional



- e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan. Inovasi Daerah pemerintah Kota Bengkulu selama 4 tahun berturut-turut masuk dalam kategori Kota Terinovatif. Pada tahun 2025 Kota Bengkulu meraih penghargaan Inovative Government Award (IGA) dengan kategori Kota Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri RI.
- f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Analisis efisiensi dilakukan capaian kinerja telah mencapai 100% (seratus persen) dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan program. Terjadinya efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja terhadap1 (satu) indikator sasaran yang sesuai target, dikarenakan sumber daya yang ada berupa anggaran dan SDM yang tersedia mampu dimaksimalkan pencapaian target yang ditetapkan.
- g. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Program Penelitian dan Pengembangan, Pada tahun 2025 indeks Inovasi Daerah mencapai 80% telah melebihi target rencana yang telah ditentukan. Adapun program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini adalah Fasilitasi, Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif, kerjasama dan koordinasi antara Bappeda Kota Bengkulu dengan semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan gambaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bengkulu.

Pemerintah Kota Bengkulu bertekad mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal di masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu bersama-sama dengan segenap komponen Pembangunan Kota harus terus bekerjasama dan bersama-sama bekerja, untuk mewujudkan harapan-harapan kebutuhan yang lebih besar tersebut pada masa yang akan datang.

Bengkulu, 13 Maret 2026

Wali Kota Bengkulu,



Dedy Wahyudi